



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH

JALAN JEND. AKHMAD YANI KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH

Email : inspektorat.sry@gmail.com Website : www.inspektorat.seruyankab.go.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas ridho dan perkenannya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja ini berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026 dengan mengambil rumusan ke 3 yaitu “**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)**” yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dengan menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam bidang pengawasan.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan kami semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Inspektur Daerah
Kabupaten Seruyan,

NOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770325 199612 1 001

DAFTAR ISI

<i>Uraian</i>	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Struktur Organisasi	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III PENUTUP	16
LAMPIRAN :	
IKU ESELON II	
CASCADING	
PERJANJIAN KINERJA ESELON II	
PERJANJIAN KINERJA ESELON III	
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan yang mana mengatur tentang Tugas Pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, yaitu :

“Membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah”.

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;



- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 menyusun perencanaan kinerja yang akan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);





2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam





- Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
 17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 22);
 18. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
 19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 13).



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Penetapan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Tujuan Penyusunan Penetapan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Pejabat Bupati dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Pejabat Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi;
 - 2) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari:
 - 1) Inspektur Pembantu I;
 - 2) Inspektur Pembantu II;
 - 3) Inspektur Pembantu III;
 - 4) Inspektur Pembantu Khusus.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
 - 1) Auditor;
 - 2) P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah).

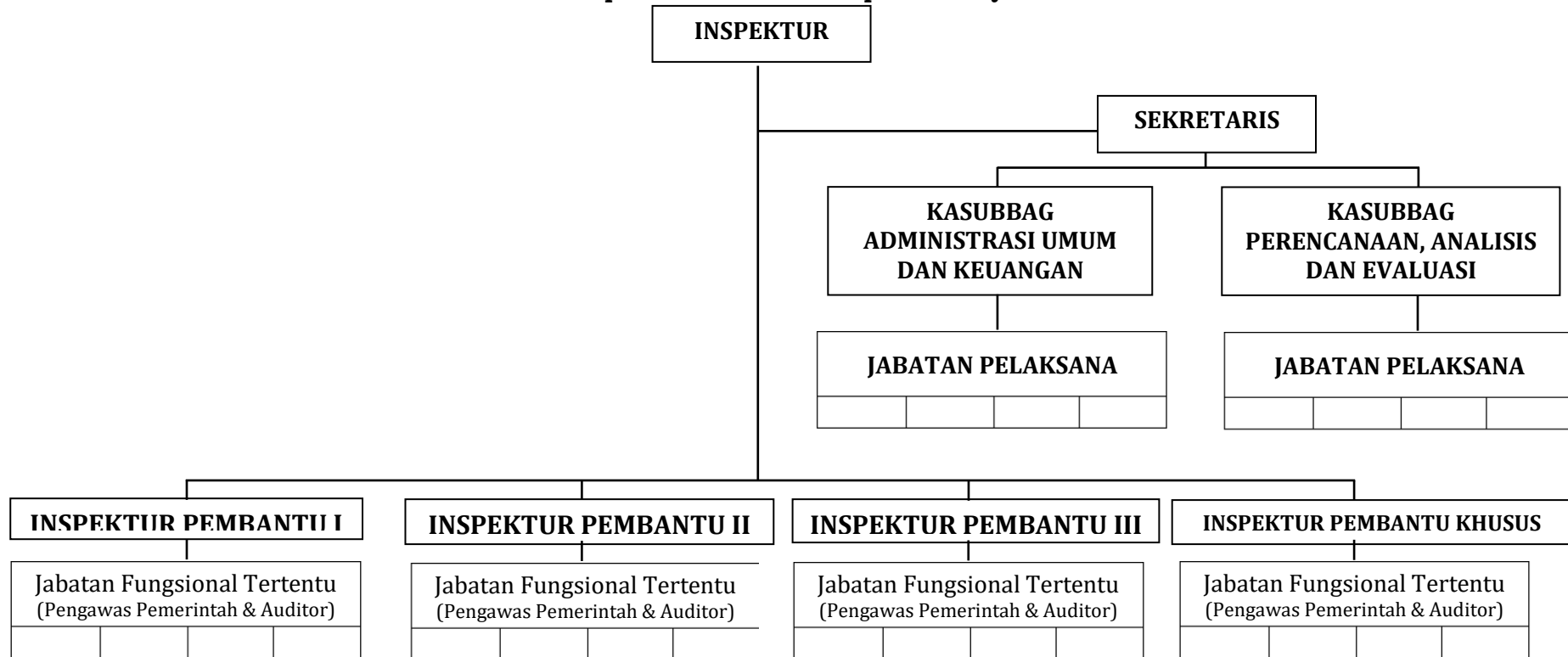


e. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Penetapan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

1. IKU ESELON II
2. CASCADING
3. PERJANJIAN KINERJA ESELON II
4. PERJANJIAN KINERJA ESELON III
5. PERJANJIAN KINERJA ESELON IV



BAB II

PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang diturunkan dengan Renstra Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, perencanaan kinerja hal-hal yang akan diperjanjikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan kepada Kepala Daerah pada tahun 2025 terdiri atas **2 (Dua) Sasaran** dengan **2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU)**, adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja Utama (IKU) : Level Kapabilitas APIP (Level)

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 telah menyusun dan menetapkan perencanaan kinerja yang akan diperjanjikan pada Tahun 2025 berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan didukung **3 (Tiga) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan**, adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pengawasan**, yang terdiri atas 2 kegiatan, yaitu :
 - a. **Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**, terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :
 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - Reviu Laporan Kinerja;
 - Reviu Laporan Keuangan;
 - Pengawasan Desa;



WS \

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					c	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
					d	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					e	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

WS \

WS \ 2025 \ 0001 \ 0002 \ 0003 \ 0004 \ 0005 \ 0006 \ 0007 \ 0008 \ 0009 \ 0010 \ 0011 \ 0012 \ 0013 \ 0014 \ 0015 \ 0016 \ 0017 \ 0018 \ 0019 \ 0020 \ 0021 \ 0022 \ 0023 \ 0024 \ 0025 \ 0026 \ 0027 \ 0028 \ 0029 \ 0030 \ 0031 \ 0032 \ 0033 \ 0034 \ 0035 \ 0036 \ 0037 \ 0038 \ 0039 \ 0040 \ 0041 \ 0042 \ 0043 \ 0044 \ 0045 \ 0046 \ 0047 \ 0048 \ 0049 \ 0050 \ 0051 \ 0052 \ 0053 \ 0054 \ 0055 \ 0056 \ 0057 \ 0058 \ 0059 \ 0060 \ 0061 \ 0062 \ 0063 \ 0064 \ 0065 \ 0066 \ 0067 \ 0068 \ 0069 \ 0070 \ 0071 \ 0072 \ 0073 \ 0074 \ 0075 \ 0076 \ 0077 \ 0078 \ 0079 \ 0080 \ 0081 \ 0082 \ 0083 \ 0084 \ 0085 \ 0086 \ 0087 \ 0088 \ 0089 \ 0090 \ 0091 \ 0092 \ 0093 \ 0094 \ 0095 \ 0096 \ 0097 \ 0098 \ 0099 \ 0100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					f Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penyediaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

WS \ 2025 \ 0001 \ 0002 \ 0003 \ 0004 \ 0005 \ 0006 \ 0007 \ 0008 \ 0009 \ 0010 \ 0011 \ 0012 \ 0013 \ 0014 \ 0015 \ 0016 \ 0017 \ 0018 \ 0019 \ 0020 \ 0021 \ 0022 \ 0023 \ 0024 \ 0025 \ 0026 \ 0027 \ 0028 \ 0029 \ 0030 \ 0031 \ 0032 \ 0033 \ 0034 \ 0035 \ 0036 \ 0037 \ 0038 \ 0039 \ 0040 \ 0041 \ 0042 \ 0043 \ 0044 \ 0045 \ 0046 \ 0047 \ 0048 \ 0049 \ 0050 \ 0051 \ 0052 \ 0053 \ 0054 \ 0055 \ 0056 \ 0057 \ 0058 \ 0059 \ 0060 \ 0061 \ 0062 \ 0063 \ 0064 \ 0065 \ 0066 \ 0067 \ 0068 \ 0069 \ 0070 \ 0071 \ 0072 \ 0073 \ 0074 \ 0075 \ 0076 \ 0077 \ 0078 \ 0079 \ 0080 \ 0081 \ 0082 \ 0083 \ 0084 \ 0085 \ 0086 \ 0087 \ 0088 \ 0089 \ 0090 \ 0091 \ 0092 \ 0093 \ 0094 \ 0095 \ 0096 \ 0097 \ 0098 \ 0099 \ 0100

BAB III PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu dilakukan perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam suatu pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tentulah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Dalam perencanaan kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025, bahwa hal-hal yang telah diperjanjikan oleh Inspektorat Kabupaten Seruyan kepada Kepala Daerah pada tahun 2025 terdiri atas 2 (Dua) Sasaran Strategis yang harus dicapai pada pelaksanaan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.

Demikian dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2025 ini dibuat, dengan harapan bahwa capaian target kinerja yang telah diperjanjikan dapat tercapai dengan baik melalui pelaksanaan program/kegiatan lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

**INSPEKTUR,**

NONO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19770325 199612 1 001

KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

Unit Kerja : Inspektorat Daerah
 Jabatan : Inspektur
 Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
 d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
 h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP Hasil Quality Assurance BPKP	Hasil Quality Assurance BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng	Irban I, II, III dan Irbansus	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh temuan x 100%	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan 2. Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Pengawasan Desa 6. Kerjasama Pengawasan Internal 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
											2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	1. Penanganan penyelesaian kerugian negara / daerah 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Irbansus	2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah dengan pengendalian intern baik / Jumlah total perangkat daerah x 100%	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun
													2. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun
											2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
													2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
													3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
													4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
2.	Mewujudkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Laporan LHKPN	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi dari APIP	Hasil Evaluasi dari APIP	Sekretaris	3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran / Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan x 100%	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
													2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
													3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
											2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
													2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
													3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
													4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
											3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
													2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
													3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
													4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
											4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
													2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
													3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
													4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
													5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
													6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
													7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
											5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
													2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
											6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBM Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
													2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
													3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
													4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

**CASCADING INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

TUJUAN	Indikator Tujuan	Target	SASARAN	Indikator Sasaran	Target			PROGRAM	Sasaran Program	Indikator Program	Target Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
					2024	2025	2026													
1. Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	Level 3 (3.050)	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	1. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya persentase penyelenggaraan pengawasan pemerintahan Daerah	1. Persentase tindak lanjut temuan	87%	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya target pengawasan internal yang dilaksanakan	1. Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	100%	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tercapainya target pengawasan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	3 Laporan	67,500,000
																2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tercapainya target pengawasan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	30 Laporan	700,000,000
																3. Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya reviu laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	10 Laporan	228,000,000
																4. Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya reviu laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	12 Laporan	230,000,000
																5. Pengawasan Desa	Terperiksanya keuangan pemerintah desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	33 Laporan	456,500,000
																6. Kerjasama Pengawasan Internal	Tercapainya target laporan saber pungli yang ditindaklanjuti	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	250,000,420
																7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Termonitornya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	10 Dokumen	556,000,000
																8. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terselesaikannya penanganan kerugian negara / daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	9 Laporan	200,000,000
																9. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terakomodirnya laporan masyarakat dan APH	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	30 Laporan	675,000,000
																10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	350,000,000
																11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	4 Rekomendasi	330,000,000
																12. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya peningkatan maturitas SPIP perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	30 Perangkat Daerah	359,000,000
																13. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya verifikasi dan penilaian mandiri reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	40 Perangkat Daerah	50,000,000
																14. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya verifikasi LHKASN dan LHKPN serta aksi pencegahan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 Kegiatan	294,900,000
																15. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya asistensi dan pendampingan penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	10 Perangkat Daerah	75,075,000

2. Mewujudkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Laporan LHKPN	100%	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,40)	B (60,50)	B (60,60)	3.PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	5.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	11 Dokumen	100,000,000
												17. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LKJIP perangkat daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	64,000,000				
												18. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	57,000,000				
												6.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	100%	19. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang / Bulan	9,001,182,573
																20. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	184,175,988
																21. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	100,000,000
																22. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	12 Laporan	17,000,000
												7.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin kepegawaian perangkat daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90%	23. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas serta kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	65 Paket	318,189,897
																24. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terdapat dengan tertibnya administrasi kepegawaian kantor	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	16 Dokumen	100,000,000
																25. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 Orang	1,005,000,000
26. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 Orang	500,490,000																
8.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	90%	27. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	141,100,000												
				28. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	64 Paket	1,847,674,800												
				29. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25 Paket	75,000,000												
				30. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	615,000,000												
				31. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	32,000,000												
				32. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar harian	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	11,949,000												
				33. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34 Laporan	350,375,000												



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP**

Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DJAINUDDIN NOOR**

Jabatan : Pj. Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua

Pj. BUPATI SERUYAN,



DJAINUDDIN NOOR

Pihak Pertama

INSPEKTUR,



NOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770325 199612 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
INSPEKTORAT DAERAH

JALAN JENDERAL AKHMAD YANI KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
Email : inspektorat.sry@gmail.com Website : www.inspektorat.seruyankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TRI WULAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP**

Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DJAINUDDIN NOOR**

Jabatan : Pj. Bupati Seruyan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan membuat laporan target rencana kinerja yang direalisasikan pada Laporan Triwulan, yang termuat dalam Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja terlampir.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi, yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua



Pihak Pertama



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,50)

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM SESUAI RPD 2024-2026	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	25%	50%	75%	100%	17,858,538,481
2.	Meningkatnya persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	87	25%	40%	60%	87%	3,363,000,420
3.	Meningkatnya Persentase Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah	Persen	90	10%	30%	60%	90%	1,458,975,000

	Program	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp 17,858,538,481,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 3,363,000,420,00	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1,458,975,000,00	APBD

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

BUPATI SERUYAN



D. JAINUDDIN NOOR

INSPEKTUR



NGMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770325 199612 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURUL KOMARIAH, S.AP**
Jabatan : Plt. Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP**
Jabatan : Inspektur Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua



Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

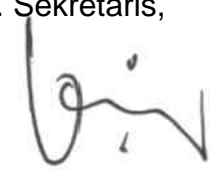
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Inspektur Daerah
Kabupaten Seruyan,

Pihak Pertama
Plt. Sekretaris,



NOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770325 199612 1 001


NURUL KOMARIAH, S.AP
Penata (III/c)
NIP. 19860218 200501 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	100%
3.	Meningkatnya disiplin kepegawaian perangkat daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90%
4.	Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	90%
5.	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemda	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
6.	Meningkatnya ukuran pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMĐ perangkat daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMĐ perangkat daerah	90%
7.	Tercapainya target pengawasan internal yg dilaksanakan	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	100%
		Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	100%
8.	Terlaksananya perumusan dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persentase kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan	90%

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN SESUAI RPD 2024-2026	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persen	100	25%	50%	75%	100%	221.000.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN SESUAI RPD 2024-2026	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Meningkatnya persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	Persen	100	25%	50%	75%	100%	9.302.358.560,50
3.	Meningkatnya disiplin kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	90	25%	50%	75%	90%	1.923.679.897
4.	Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	90	25%	50%	75%	90%	3.073.098.800
5.	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemda	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	25%	50%	75%	100%	880.587.744
6.	Meningkatnya ukuran pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMMD perangkat daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMMD Perangkat Daerah	Persen	90	25%	50%	75%	90%	2.457.813.479,50
7.	Tercapainya target pengawasan internal yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	Persen	100	25%	50%	75%	100%	2.488.000.420
			Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	Persen	100	25%	50%	75%	100%	

NO.	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN SESUAI RPD 2024-2026	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.	Terlaksananya perumusan dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan	Persen	90	25%	50%	75%	90%	680.000.000

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Inspektur Daerah
Kabupaten Seruyan,



NOMO KOESWOYO, S.STP

Penbina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama
Plt. Sekretaris,

NURUL KOMARIAH, S.AP

Penata (III/c)
NIP.19860218 200501 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra.MASITAH.,MM.,CRA**
Jabatan : Inspektur Pembantu I

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP**
Jabatan : Inspektur Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Inspektur Daerah
Kabupaten Seruyan,



NOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama
Inspektur Pembantu I,

Dra.MASITAH.MM.,CRA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19680524 199503 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya target pengawasan internal yang dilaksanakan	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	100%
		Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN SESUAI RPD 2024-2026	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tercapainya target pengawasan internal yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	Persen	100	25%	50%	75%	100%	2.488.000.420
			Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	Persen	100	25%	50%	75%	100%	

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya target pengawasan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	1 Laporan
2.	Tercapainya target pengawasan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	10 Laporan
3.	Terlaksananya reviu laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu kinerja perangkat daerah	4 Laporan
4.	Terlaksananya reviu laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu keuangan perangkat daerah	3 Laporan
5.	Terperiksanya keuangan pemerintah desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	11 Laporan
6.	Termonitornya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	1 Dokumen

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2024-2026	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tercapainya target pengawasan kinerja perangkat daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	1	-	-	1 Laporan	1 Laporan	67.500.000,00
2.	Tercapainya target pengawasan keuangan perangkat daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	10	-	1 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	700.000.000,00
3.	Terlaksananya revidu laporan kinerja perangkat daerah	Revidu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil revidu kinerja perangkat daerah	Laporan	4	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	228.000.000,00
4.	Terlaksananya revidu laporan keuangan perangkat daerah	Revidu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil revidu keuangan perangkat daerah	Laporan	3	-	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	230.000.000,00
5.	Terperiksanya keuangan pemerintah desa	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Laporan	11	-	6 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	456.500.000,00
6.	Termonitornya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	1	1 Doku men	1 Doku men	1 Dokum en	1 Dokum en	556.000.000,00

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Inspektur Daerah
Kabupaten Seruyan,



NOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama
Inspektur Pembantu I,

Dra.MASITAH.MM..CRA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19680524 199503 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si**
Jabatan : Inspektur Pembantu II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP**
Jabatan : Inspektur Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Inspektur Daerah
Kabupaten Seruyan,



NOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama
Inspektur Pembantu II,

DIDI DJUNAEDI, A.Ks.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19680927 199803 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya target pengawasan internal yang dilaksanakan	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	100%
		Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN SESUAI RPD 2024-2026	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tercapainya target pengawasan internal yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	Persen	100	25%	50%	75%	100%	2.488.000.420
			Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	Persen	100	25%	50%	75%	100%	

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya target pengawasan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	1 Laporan
2.	Tercapainya target pengawasan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	10 Laporan
3.	Terlaksananya reviu laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu kinerja perangkat daerah	4 Laporan
4.	Terlaksananya reviu laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu keuangan perangkat daerah	4 Laporan
5.	Terperiksanya keuangan pemerintah desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	11 Laporan
6.	Termonitornya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	1 Dokumen

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2024-2026	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tercapainya target pengawasan kinerja perangkat daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	1	-	-	1 Laporan	1 Laporan	67.500.000,00
2.	Tercapainya target pengawasan keuangan perangkat daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	10	-	1 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	700.000.000,00
3.	Terlaksananya revidi laporan kinerja perangkat daerah	Revidi Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil revidi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	228.000.000,00
4.	Terlaksananya revidi laporan keuangan perangkat daerah	Revidi Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil revidi keuangan perangkat daerah	Laporan	3	-	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	230.000.000,00
5.	Terperiksanya keuangan pemerintah desa	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Laporan	11	-	6 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	456.500.000,00
6.	Termonitornya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	556.000.000,00

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Inspektur Daerah
Kabupaten Seruyan,



NEMO KOESWOYO. S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama
Inspektur Pembantu II,

DIDI DJUNAEDI. A.Ks..M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19680927 199803 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H.MUHAMMAD HASAN, SH.,MSM**
Jabatan : Inspektur Pembantu III

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP**
Jabatan : Inspektur Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Inspektur Daerah
Kabupaten Seruyan,

Pihak Pertama
Inspektur Pembantu III,



NOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770325 199612 1 001


H. MUHAMMAD HASAN, SH.,MSM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19681029 199003 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya target pengawasan internal yang dilaksanakan	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	100%
		Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN SESUAI RPD 2024-2026	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tercapainya target pengawasan internal yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	Persen	100	25%	50%	75%	100%	2.488.000.420
			Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	Persen	100	25%	50%	75%	100%	

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya target pengawasan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	1 Laporan
2.	Tercapainya target pengawasan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	10 Laporan
3.	Terlaksananya reviu laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu kinerja perangkat daerah	2 Laporan
4.	Terlaksananya reviu laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu keuangan perangkat daerah	4 Laporan
5.	Terperiksanya keuangan pemerintah desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	11 Laporan
6.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	1 Dokumen

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2024-2026	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tercapainya target pengawasan kinerja perangkat daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	1	-	-	1 Laporan	1 Laporan	67.500.000,00
2.	Tercapainya target pengawasan keuangan perangkat daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	10	-	1 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	700.000.000,00
3.	Terlaksananya revidu laporan kinerja perangkat daerah	Revidu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil revidu kinerja perangkat daerah	Laporan	2	-	-	1 Laporan	2 Laporan	228.000.000,00
4.	Terlaksananya revidu laporan keuangan perangkat daerah	Revidu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil revidu keuangan perangkat daerah	Laporan	4	-	1 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	230.000.000,00
5.	Terperiksanya keuangan pemerintah desa	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Laporan	11	-	6 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	456.500.000,00
6.	Termonitornya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	556.000.000,00

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Inspektur Daerah
Kabupaten Seruyan,

JOYO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama/Muda (IV/c)
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama
Inspektur Pembantu III,

H. MUHAMMAD HASAN, SH..MSM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19681029 199003 1 003





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ISMIRANTO, SKM.,MPH.,CRA**
Jabatan : Inspektur Pembantu Khusus

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP**
Jabatan : Inspektur Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Inspektur Daerah
Kabupaten Seruyan,

Pihak Pertama
Inspektur Pembantu Khusus,


NOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770325 199612 1 001


ISMIRANTO,SKM.,MPH.,CRA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19670405 199203 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya target pengawasan internal yg dilaksanakan	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	100%
		Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	100%
2.	Tercapainya target kegiatan pengawasan dgn tujuan tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	90%
3.	Terlaksananya pendampingan dan asistensi perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah	90%
		Nilai <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP)</i>	90,00
		Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	72,00

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN SESUAI RPD 2024-2026	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tercapainya target pengawasan internal yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	Persen	100	25%	50%	75%	100%	2.488.000.420
			Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	Persen	100	25%	50%	75%	100%	
2.	Tercapainya target kegiatan pengawasan dgn tujuan tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	Persen	90	25%	50%	75%	90%	875.000.000

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN SESUAI RPD 2024-2026	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	Terlaksananya pendampingan dan asistensi perangkat daerah	Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah	Persen	90	25%	50%	75%	90%	778.975.000
			Nilai <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP)</i>	Skor	90,00	25,00	50,00	75,00	90,00	
			Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	72,00	0	0	72,00	72,00	

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya reviu laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu kinerja perangkat daerah	9 Laporan
2.	Terlaksananya reviu laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu keuangan perangkat daerah	1 Laporan
3.	Terselesaikannya penanganan kerugian negara / daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	9 Laporan
4.	Terakomodirnya laporan masyarakat dan APH	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	30 Laporan
5.	Tercapainya peningkatan maturitas SPIP perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	30 Perangkat Daerah
6.	Terlaksananya verifikasi dan penilaian mandiri reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	40 Perangkat Daerah
7.	Terlaksananya verifikasi LHKASN dan LHKPN serta aksi pencegahan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 Kegiatan
8.	Terlaksananya asistensi dan pendampingan penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	10 Perangkat Daerah

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2024-2026	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terlaksananya reviu laporan kinerja perangkat daerah	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja perangkat daerah	Laporan	10	2 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	10 Laporan	228.000.000,00
2.	Terlaksananya reviu laporan keuangan perangkat daerah	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu keuangan perangkat daerah	Laporan	1	-	-	-	1 Laporan	230.000.000,00
3.	Terselesaikannya penanganan kerugian negara / daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Laporan	9	-	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	200.000.000,00
4.	Terakomodirnya laporan masyarakat dan APH	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	30	5 Laporan	15 Laporan	25 Laporan	30 Laporan	675.000.000,00
5.	Tercapainya peningkatan maturitas SPIP perangkat daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	30	5 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	359.000.000,00
6.	Terlaksananya verifikasi dan penilaian mandiri reformasi birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	40	-	-	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	50.000.000,00
7.	Terlaksananya verifikasi LHKASN dan LHKPN serta aksi pencegahan korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	4	1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	294.900.000,00

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2024-2026	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.	Terlaksananya asistensi dan pendampingan penegakan integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat Daerah	10	-	-	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	75.075.000,00

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Inspektur Daerah
Kabupaten Seruyan,



NOMO KOESWOYO. S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770325 199612 1 001

Pihak Pertama
Inspektur Pembantu Khusus,

ISMIRANTO.S.KM..MPH..CRA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19670405 199203 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERNA YUNIATI, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP**
Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Inspektur,



NOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770325 199612 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Administrasi, Umum dan
Keuangan,

ERNA YUNIATI, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.19810604 201001 2 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan
2.	Terbayarnya jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen
3.	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan
4.	Tersedianya laporan keuangan bulanan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	12 Laporan
5.	Terdata dengan tertibnya administrasi kepegawaian kantor	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	16 Dokumen
6.	Terpenuhinya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 Orang
7.	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	15 Orang
8.	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket
9.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	64 Paket
10.	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25 Paket
11.	Terpenuhinya logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket
12.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket
13.	Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34 Laporan
14.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
15.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 Unit
17.	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit
18.	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit
19.	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5 Unit

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2024-2026	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	32	32 Org/Bulan	32 Org/Bulan	32 Org/Bulan	32 Org/Bulan	9.001.182.572,50
2.	Terbayarnya jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	3 Dokumen	6 Dokumen	9 Dokumen	12 Dokumen	184.175.988,00
3.	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	2	-	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00
4.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	12	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00
5.	Terdata dengan tertibnya administrasi kepegawaian kantor	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	16	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100.000.000,00
6.	Terpenuhinya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	25	5 Orang	10 Orang	15 Orang	25 Orang	1.005.000.000,00

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2024-2026	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	15	3 Orang	7 Orang	12 Orang	15 Orang	500.490.000,00
8.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	3 Paket	6 Paket	9 Paket	12 Paket	141.100.000,00
9.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	60	12 Paket	24 Paket	48 Paket	64 Paket	1.847.674.800,00
10.	Tersedianya peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	25	5 Paket	10 Paket	20 Paket	25 Paket	75.000.000,00
11.	Terpenuhinya logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	3 Paket	6 Paket	9 Paket	12 Paket	615.000.000,00
12.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5	1 Paket	2 Paket	3 Paket	5 Paket	32.000.000,00
13.	Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	33	5 Laporan	15 Laporan	25 Laporan	34 Laporan	350.375.000,00
14.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	337.589.896,00
15.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	542.997.848,00
16.	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	25	5 Unit	10 Unit	15 Unit	25 Unit	257.780.000,00

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2024-2026	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17.	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja dan mesin yang dipelihara	Unit	34	10 Unit	15 Unit	25 Unit	34 Unit	115.000.000,00
18.	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.175.475.256,00
19.	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	5	1 Unit	2 Unit	4 Unit	5 Unit	909.558.223,50

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Inspektur,



NOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770325 199612 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Administrasi, Umum dan
Keuangan,

ERNA YUNIATI, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.19810604 201001 2 010



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURUL KOMARIAH, S.AP**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NOMO KOESWOYO, S.STP**
Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Inspektur,

Pihak Pertama
Kasubbag Perencanaan, Analisis dan
Evaluasi,


NOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770325 199612 1 001


NURUL KOMARIAH, S.AP
Penata (III/c)
NIP.19860218 200501 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	11 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen LKJIP perangkat daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan
3.	Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan
4.	Tersedianya pakaian dinas serta kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	65 Paket
5.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen
6.	Termonitornya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	10 Dokumen
7.	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi
8.	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan yang disusun	4 Rekomendasi

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2024-2026	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	11	3 Dokumen	6 Dokumen	9 Dokumen	11 Dokumen	100.000.000,00
2.	Tersedianya dokumen LKJIP perangkat daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	64.000.000,00

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN SESUAI RENSTRA 2024-2026	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN (Rp)
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	57.000.000,00
4.	Tersedianya pakaian dinas serta kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	65	-	-	65 Paket	65 Paket	318.189.897,00
5.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	5	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	11.949.000,00
6.	Termonitornya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	10	2 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	10 Dokumen	556.000.000,00
7.	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	1	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	350.000.000,00
8.	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Rekomendasi	4	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	330.000.000,00

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Inspektur,



NOMO KOESWOYO, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770325 199612 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Perencanaan, Analisis dan
Evaluasi,

NURUL KOMARIAH, S.AP
Penata (III/c)
NIP.19860218 200501 2 002